

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Kecakapan Managerial

Rahman dkk. (2007) mengutarakan bahwa salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan adalah dengan adanya *manager* yang berhasil mendesain proses bisnis yang efisien dan mampu membuat keputusan – keputusan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan memenuhi tanggung jawab sosialnya, sebagian besar tergantung pada *manager*. Apabila *manager* mampu melakukan tugas – tugasnya dengan baik, maka organisasi akan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang dikehendaki. Seberapa baik seorang *manager* melakukan perannya dalam mengerjakan tugas – tugas yang merupakan isu utama yang sering diperdebatkan dalam penelitian akhir – akhir ini.

Disamping itu, *manager* juga mempunyai kewajiban untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada pihak luar perusahaan (*stakeholders*) yang berkepentingan dengan perusahaan. Wadah yang paling tepat bagi *manager* untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan

Badan Standar Akuntansi memperbolehkan *manager* menggunakan *judgment* dalam membuat laporan keuangan dengan tujuan agar laporan tersebut sesuai dengan kondisi bisnis masing – masing perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai dari akuntansi sebagai suatu bentuk komunikasi. Healy dan Wahlen (1999) dalam Isnugrahi dan Kusuma (2009) mencontohkan beberapa bentuk dari *judgment manager* dalam laporan keuangan tersebut, misalnya adalah pengestimasiian kejadian – kejadian yang mengandung nilai ekonomis di masa mendatang seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai sisa dari aktiva jangka panjang. *Manager* juga harus memilih dari seperangkat metode akuntansi yang diperbolehkan untuk melaporkan transaksi – transaksi ekonomis yang sama seperti penggunaan metode garis lurus atau metode percepatan dalam pencatatan depresiasi, ataupun memilih LIFO atau FIFO dalam penilaian sediaan. *Manager* juga harus memilih untuk membebankan atau menangguhkan pengeluaran-pengeluaran seperti penelitian dan pengembangan.

Agar semua *judgment* seperti di atas dapat dilakukan dengan baik, *manager* dituntut untuk memiliki keahlian yang cukup. *Manager* bisa memiliki keahlian tersebut karena mereka biasanya mempunyai tingkat intelegensia dan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Disamping itu, tingkat pengalaman *manager* juga turut menentukan keahlian managerial yang dimilikinya. Dalam penelitian Isnugrahi dan Kusuma (2009)

managerial dalam bidang akuntansi keuangan belum banyak dilakukan. Hal ini disebabkan kesulitan untuk mengukur variabel kecakapan managerial tersebut. Demerjian dkk. (2006) dalam Isnugrahadi dan Kusuma (2009) mengenalkan DEA (*Data Envelopment Analysis*) sebagai alat pengukur kecakapan managerial. Dalam penelitiannya, Demerjian dkk (2006) dalam Isnugrahadi dan Kusuma (2009) mencoba menguji pengaruh kecakapan managerial terhadap kualitas laba.

2. Kinerja Perusahaan

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program serta kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam hubungannya dengan kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah

laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. *Disclosure* laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. *Disclosure* sebagai salah satu aspek *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang.

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

Penilaian perusahaan khususnya kinerja sering dilakukan yang bertujuan :

- a. Untuk memperoleh pendapat wajar atas penyertaan dalam suatu perusahaan atau menunjukkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada di dalam neraca.

- b. Untuk keperluan merger dan akuisisi, yaitu untuk mengetahui berapa nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan.
- c. Untuk kepentingan usaha, yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai usaha lebih besar daripada nilai likuiditasnya.
- d. Memeroleh pembelanjaan penetapan besarnya pinjaman atau tambahan modal.

3. *Good Corporate Governance (GCG)*

a. Definisi GCG

- 1) Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- 2) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya
- 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

b. Manfaat GCG

Tujuan utama dari penerapan prinsip GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan

kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, (2003) dalam Wardani (2008)). Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan. Selain itu, prinsip – prinsip CG yang diterapkan akan memberikan manfaat lainnya yaitu:

- 1) Menciptakan *competitive advantage* bagi perusahaan
 - 2) Membuat perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan dapat mencegah fraud dan malpraktik
 - 3) Meyakinkan pihak lain akan terpenuhinya segala bentuk hukum dan peraturan
 - 4) Meminimalkan *agency cost*
 - 5) Meningkatkan citra perusahaan
- c. Prinsip – prinsip GCG
- 1) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Adalah adanya kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat. Prinsip pertanggungjawaban menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholders*, *stakeholders* dan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.

2) *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) adalah adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rapat umum pemegang saham, komisaris atau dewan pengawas dan direksi, serta pemilik modal sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanakan secara efektif dan efisien.

3) *Fairness* (Keadilan)

Fairness (Keadilan) adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak – hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak – hak pemegang saham, termasuk hak – hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang sama terhadap semua investor.

4) *Transparency* (Transparansi)

Transparency (Transparansi) adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Beberapa praktek yang dikembangkan dalam rangka transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi – transaksi penting yang berkaitan

dengan perusahaan, risiko – risiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan yang akan dijalankan.

5) *Independency* (Independensi)

Independency (Independensi) adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

Isu *corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan *manager* adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain dikemukakan oleh Shleifer dan Vishny (1997) dalam Klapper (2002) yang menyatakan *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk menyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Iskandar dkk (1999) dalam Darmawati (2004) menyatakan bahwa *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders*

untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return*. Selain itu *corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar.

Black (2001) menyatakan bahwa masalah *corporate governance* merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak – pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda – beda. Perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti:

1. Kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*)

Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen dari pada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi.

2. Kepemilikan terkonsentrasi (*closely held*)

Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling interest* dan *minority interest* (*shareholders*).

3. Kepemilikan dalam BUMN

Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol secara langsung perusahaannya.

Pemiliknya hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk (misalnya

menteri). Kesepakatan dapat terjadi antara pemilik dengan manajemen, wakil pemilik dan pihak manajemen dengan kreditur.

Zeka (2005) menyatakan Garis Besar Item GCG adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham
 - a) Hak pemegang saham
 - b) Rapat umum pemegang saham
 - c) Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham
 - d) Akuntabilitas pemegang saham
 - e) Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan anggota dewan komisaris serta direksi.
- 2) Dewan komisaris
 - a) Fungsi dewan komisaris
 - b) Komposisi dewan komisaris
 - c) Kepatuhan terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d) Rapat dewan komisaris
 - e) Informasi untuk dewan komisaris
 - f) Hubungan usaha lain antara anggaran dewan komisaris dan atau direksi dengan perseroan
 - g) Larangan mengambil keputusan pribadi

- h) Sistem pengangkatan para eksekutif yang tidak menjabat sebagai anggota direksi, penentuan gaji dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian kinerja mereka
 - i) Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris
- 3) Direksi
- a) Peran direksi
 - b) Komposisi direksi
 - c) Kepatuhan terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d) Larangan mengambil keuntungan pribadi
 - e) Rapat direksi
 - f) Pengawasan internal
 - g) Peran direksi dalam akuntansi
 - h) Penyelenggaraan daftar - daftar oleh direksi
- 4) Sistem audit
- a) Eksternal auditor
 - b) Komite audit
 - c) Informasi
 - d) Kerahasiaan
 - e) Peraturan audit
- 5) Sekretaris perusahaan
- a) Fungsi sekretaris perusahaan
 - b) Kualifikasi

- c) Akuntabilitas
 - d) Peran sekretaris perusahaan dalam pengungkapan hal - hal tertentu
- 6) Pihak yang berkepentingan
- a) Hak pihak yang berkepentingan
 - b) Keikut sertaan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan atau pemenuhan peraturan perundang-undangan oleh direksi
- 7) Keterbukaan
- a) Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat
 - b) Hal-hal yang penting dalam pengambilan keputusan
 - c) Pengungkapan atas kepatuhan terhadap pedoman
 - d) Pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga
 - e) Kerahasiaan
 - f) Informasi orang dalam
 - g) Etika berusaha dan anti korupsi
 - h) Donasi
 - i) Kepatuhan terhadap perundang - undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan
 - j) Kesempatan kerja yang sama.

4. *Data Envelopment Analysis (DEA)*

Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Charnes, Coopers dan Rhodes (CCP) pada tahun 1978, dan kemudian semakin berkembang

hingga saat sekarang ini. Mengingat telah banyaknya perkembangan model matematis DEA ini, maka sebagian besar mengatakan bahwa DEA adalah metode bukan model. Pendekatan DEA lebih menekankan kepada melakukan evaluasi terhadap kinerja DMU (*Decision Making Unit*). Analisis yang dilakukan berdasarkan kepada evaluasi terhadap efisiensi relatif dari DMU yang sebanding. Selanjutnya DMU – DMU yang efisien tersebut akan membentuk garis *frontier*.

Biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi relatif organisasi atau perusahaan. Satuan ukuran ini biasanya dinyatakan dalam DMU atau Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE yang dibandingkan dengan efisiensi UKE lainnya dalam satu kesatuan populasi sampel. Di sini berlaku syarat bahwa UKE-UKE tersebut memiliki set data yang terdiri dari jenis *input* dan *output* yang sama.

Menurut DEA, UKE dikatakan efisien jika rasio perbandingan *output/input* sama dengan 1 atau 100%, artinya UKE tersebut sudah tidak lagi melakukan pemborosan dalam penggunaan *input – inputnya* dan atau mampu memanfaatkan secara optimal kemampuan potensial produksi yang dimiliki sehingga mampu mencapai tingkat yang efisien. Suatu UKE dikatakan kurang efisien jika rasio perbandingan *output/input* bernilai antara $0 \leq \text{output/input} < 1$ atau nilainya kurang dari 100% artinya UKE tersebut masih melakukan tindakan-tindakan pemborosan dalam penggunaan *input input* dan atau belum mampu memanfaatkan *input-input*

yang dimiliki untuk digunakan supaya mampu menghasilkan *output* yang optimal (Karsinah, 2007) dalam Isnugrahadi dan Kusuma (2009).

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Kecakapan managerial dan Kinerja perusahaan

Laba dalam akuntansi dimaknai sebagai dasar pengukur kinerja perusahaan dan *management*. Hasil penelitian Demerjian dkk. (2006) dalam Isnugrahadi dan Kusuma (2009) menemukan hubungan positif antara kecakapan managerial dengan kualitas laba, begitu juga hasil penelitian (Isnugrahadi dan Wijaya (2009)) menemukan hubungan positif antara kecakapan managerial dengan manajemen laba. Kedua penelitian ini menggunakan analisis DEA untuk mengukur variabel kecakapan managerial yang diperkenalkan oleh Demerjian dkk. (2006) dalam Isnugrahadi dan Kusuma (2009).

Seorang *manager* dikatakan cakap apabila manager tersebut memiliki keahlian yang memadai dalam bidang yang terjadi tanggungjawabnya. Keahlian itu bisa didapatkan *manager* karena mereka biasanya mempunyai tingkat intelegensia dan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Pengalaman juga merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menentukan tingkat kecanggihan seorang *manager*. Semakin berpengalaman seorang *manager* biasanya berbanding lurus dengan pemahaman *manager* tersebut akan kondisi bisnis perusahaannya. *Manager* dalam menjalankan tugasnya juga dipengaruhi oleh *explicit professional codes of conduct* atau *implicit codes of*

ethics, sehingga setiap keputusan *manager* semestinya merefleksikan pertimbangan professional manager tersebut, bukan sebuah keputusan penuh rekayasa yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Setiap keputusan *manager* pada akhirnya akan mempunyai dampak pada perusahaan yang mereka pimpin yaitu pengambilan keputusan tingkat perusahaan merefleksikan tingkat kecakapan/karismatik dari manager yang berbeda – beda. Kepemimpinan karismatik menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi dilingkungan para pengikut yang termotivasi dan terpuaskan (Bass, 1985; Conger dan Kanungo, 1988). Shamir dkk. (1993) dalam Djohantini (2006) menemukan bahwa kepemimpinan karismatik berhubungan secara positif dengan sikap, kinerja dan kepuasan para pengikut. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Bass dan Avolio (1993). Penelitian – penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Luthans (2002) dan Alberto *et al.* (2005) dalam Trisnaningsih (2007) bahwa kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja. Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kecakapan managerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

2. Kecakapan Managerial, Kinerja Perusahaan dan GCG

Harapan dengan tingginya kecakapan managerial dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi perusahaan adalah untuk menaikkan

kinerja perusahaan. Dengan demikian, kepemimpinan yang diterapkan dapat

meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai *codes of corporate governance* hampir di semua negara. Sebagai contoh, Dey Report (1994) dan Kusumawati (2005) dalam Wardani (2008) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham namun juga untuk kepentingan publik secara umum. Sunarto (2003) dalam Wardani (2008) juga menyatakan apabila *good corporate governance* tercapai maka kinerja saham perusahaan tersebut akan semakin meningkat, penelitian ini didukung dengan penelitian Brown dan Caylor (2004) dalam Antasari (2007) yang mengutarakan bahwa perusahaan – perusahaan yang dikelola dengan baik akan memiliki Kinerja Perusahaan yang tinggi pula. Penerapan *good corporate governance* membawa manfaat besar bagi perusahaan. Deni dkk. (2004) dalam ujiyantho dan Pramuka (2007) mengatakan bahwa *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik *monitoring* kinerja.

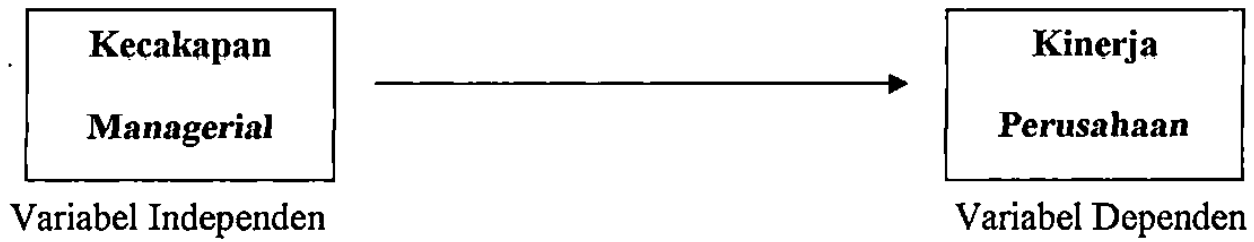
Disamping itu, Berghe dan Ridder (1999) dalam Wardani (2008), menghubungkan kinerja perusahaan dengan *good governance* tidak mudah dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya penelitian Daily dkk. (1998) dan hasil survey CBI Deloitte dan Touche (1996) sebagaimana yang

dikutip oleh Kakabadse dkk. (2001) dalam Wardani (2008). Demikian juga dengan Young (2003) dalam Wardani (2008) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan beberapa hasil penelitian, Berghe dan Ridder menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers dkk. (2003) dalam Wardani (2008) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang.

Menurut Kakabadse dkk. (2001) dalam Darmawati dkk. (2004) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: perspektif teoritis yang diterapkan, metodologi penelitian, pengukuran kinerja dan perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Semakin tinggi penerapan GCG dan semakin tinggi kecakapan managerial maka semakin tinggi kinerja perusahaan

C. Model Penelitian



Gambar 2.1.
Model Penelitian Hipotesis 1

